



PAPARAN IRWASUM POLRI
KOMJEN POL Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.



WEBINAR INTERNASIONAL
"Pengarustamaan Diskriminasi Sebagai Bentuk Maladministrasi Dan
Peran Pengawasan Ombudsman Tahun 2020"

Zoom Video Meeting, Jakarta, 23 September 2020



1. Pendahuluan





PENGERTIAN

1. Diskriminasi yakni suatu perlakuan yg tdk adil trhdp individu/kelompok dgn berdasarkan sesuatu hal, biasanya memiliki sifat kategorikal ataupun juga atribut khas.

(Theodorson & Theodorson, 1987)

2. Diskriminasi merupakan suatu perilaku yg menunjukkan penolakan trhdp individu kelompok semata-mata disebabkan krn keanggotaan seseorang di dalam kelompok.

(Sears, Freedman, dan Peplau, 1999)

3. Diskriminasi yakni suatu perilaku/sikap serta juga tindakan yg kemudian dilakukan dgn berdasarkan perbedaan di dalam kategorisasi yg dibuat oleh alam/masyarakat, yg tdk ada hubungannya dengan kemampuan individu/jasanya.

(Perserikatan Bangsa-Bangsa)

4. Diskriminasi yakni suatu perbedaan perlakuan trhdp sesama warna negara yg dilakukan oleh krn berdasarkan golongan, warna kulit, ekonomi, suku, agama serta juga sebagainya. *(Kamus Besar Bahasa Indonesia)*



DASAR

UU NO 2 TAHUN 2002
TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

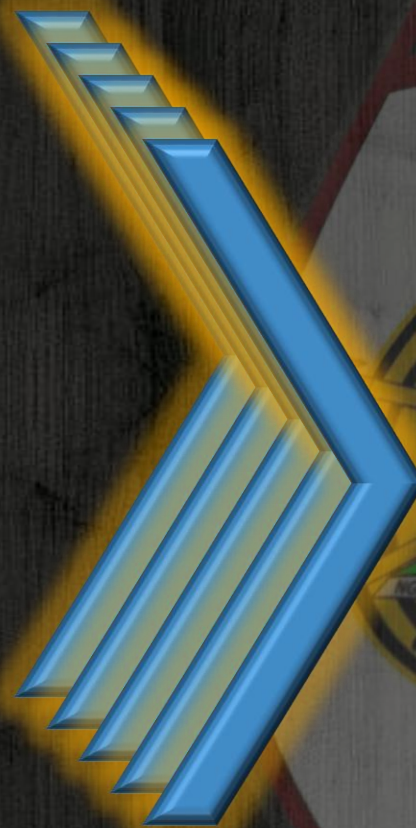
UU NO 37 TAHUN 2008
TTG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERKAP NO 6 TAHUN 2017
TTG SOTK SATUAN ORGANISASI PD TK MABES POLRI

PERPOL NO 14 TAHUN 2018
TTG SOTK PD TK POLDA



FUNGSI KEPOLISIAN



- 1 HARKAMTIBMAS
- 2 PENEGAKAN HUKUM
- 3 PERLINDUNGAN
- 4 PENGAYOMAN
- 5 PELAYANAN MASYARAKAT



STRUKTUR KEPOLISIAN

TK. PUSAT

**MARKAS
BESAR**

TK. PROVINSI

POLDA

TK. KOTA/
KABUPATEN

POLRES

TK. KECAMATAN/
KAWASAN

POLSEK

**POLSUBSEKTOR/
POSPOL**



PELAYANAN KEPOLISIAN



World Class Organization





PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI

1. Mewujudkan SDM yang Unggul
2. Pemantapan Harkamtibmas
3. Penguatan Gakkum Yg Profesional Dan Berkeadilan
4. Pemantapan Manajemen Media
5. Penguatan Sinergi Polisional
6. Penataan Kelembagaan
7. Penguatan Pengawasan



2. Pengawasan





PENGAWASAN DI LINGKUNGAN POLRI

1. DPR RI
2. BPK
3. KOMPOLNAS
4. STAF PRESIDEN
5. MENPAN RB RI
6. KOMNAS HAM
7. **OMBUDSMAN RI**
8. LSM

1. ITWASUM / ITWASDA
2. DIVPROPAM / BIDPROPAM





TUGAS POKOK ITWASUM POLRI

- ❑ **MENYELENGGARAKAN WAS DI LINGKUNGAN POLRI UTK MEMBERIKAN PENJAMINAN KUALITAS (*QUALITY ASSURANCE*)**
- ❑ **MEMBERIKAN KONSULTASI (*CONSULTANT*)**
- ❑ **PENDAMPINGAN GIAT WAS LEMBAGA WAS EKSTERNAL DI LINGKUNGAN POLRI**

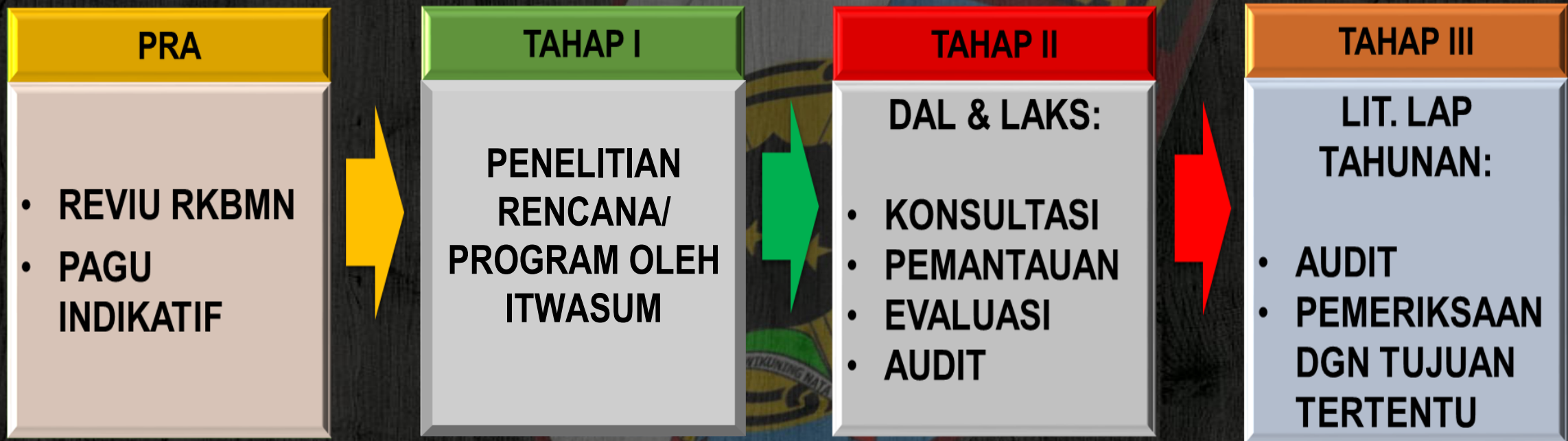


**Perkap No 6 Tahun 2017
ttg SOTK Satuan Organisasi
Pada Tk. Mabas Polri**

**Perpol No 14 Tahun 2018
ttg SOTK Pada Tk. Polda**



PROSES GIAT PENGAWASAN INTERNAL





IMPLEMENTASI PENGAWASAN





PARADIGMA BARU ITWASUM/DA SELAKU APIP

- 1 ITWASUM/ITWASDA SEBAGAI KONSULTAN (SOLUTIVE)
- 2 PENJAMIN KINERJA POLRI → (QUALITY ASSURANCE)
- 3 ITWASUM / ITWASDA MENDUKUNG IME (INTERNAL MENDUKUNG EKSTERNAL) DAN EMI (EKSTERNAL MEMANFAATKAN INTERNAL)
- 4 ITWASUM/ITWASDA MEMBANGUN KREDIBILITAS OBRIK



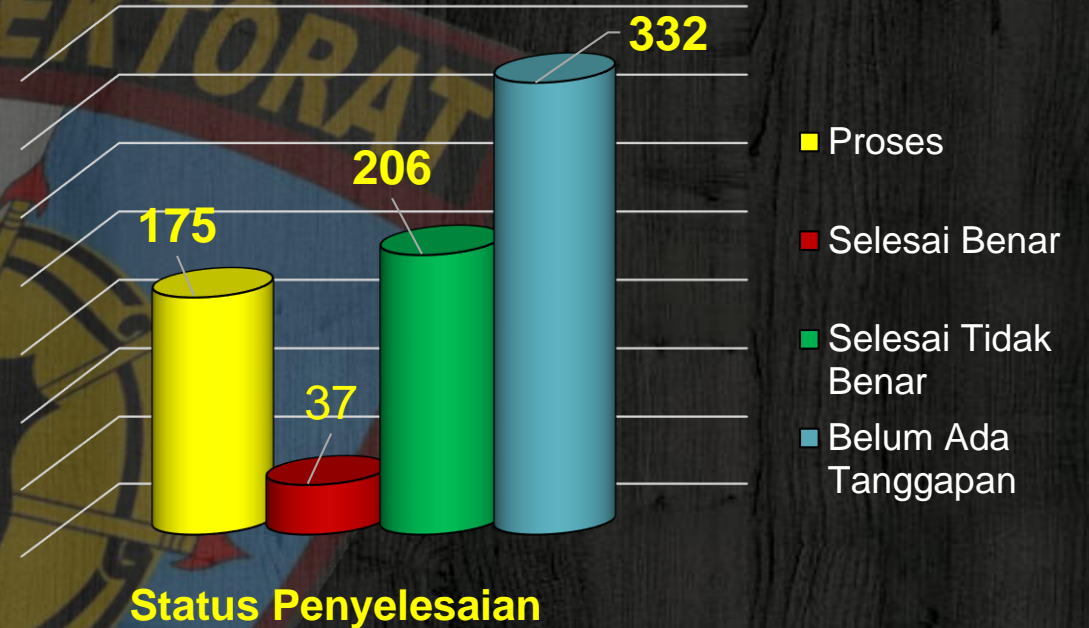
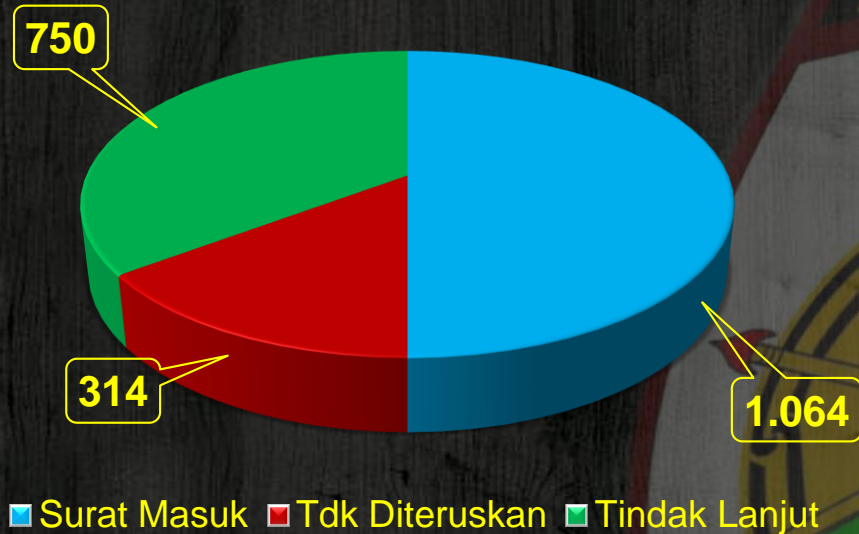


3. Data Penanganan Dumas





DATA PENANGANAN DUMAS TAHUN 2020



*Sebanyak **314** dumas tdk diteruskan/tdk ditindaklanjuti karena tdk berkadar was

Substansi / Objek Pengaduan								
Hukum/ HAM	Lahgun Wwng	Yan Masy	Waspad Nas	Personil	Pungli	Sidik TP	Tanah/ Rumah	Lain-lain
29	47	10	Nihil	28	35	573	10	17



SEBAB TINGGINYA DUMAS TERKAIT SIDIK TP

1. PENANGANAN LAPORAN POLISI/PERKARA YG BERLARUT-LARUT.
2. ADANYA KEBERPIHAKAN / INTERVENSI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI / PERKARA.
3. ADANYA REKAYASA / MANIPULASI PENANGANAN LAPORAN POLISI / PERKARA.
4. MASIH ADANYA PUNGLI DALAM PELAYANAN PUBLIK / MEMINTA IMBALAN DALAM MENANGANI LAPORAN POLISI / PERKARA.
5. MASIH TERDAPAT LAHGUN WEWENANG OLEH PENYIDIK.
6. PENYIDIK TIDAK MENYAMPAIKAN SP2HP KEPADA PELAPOR.

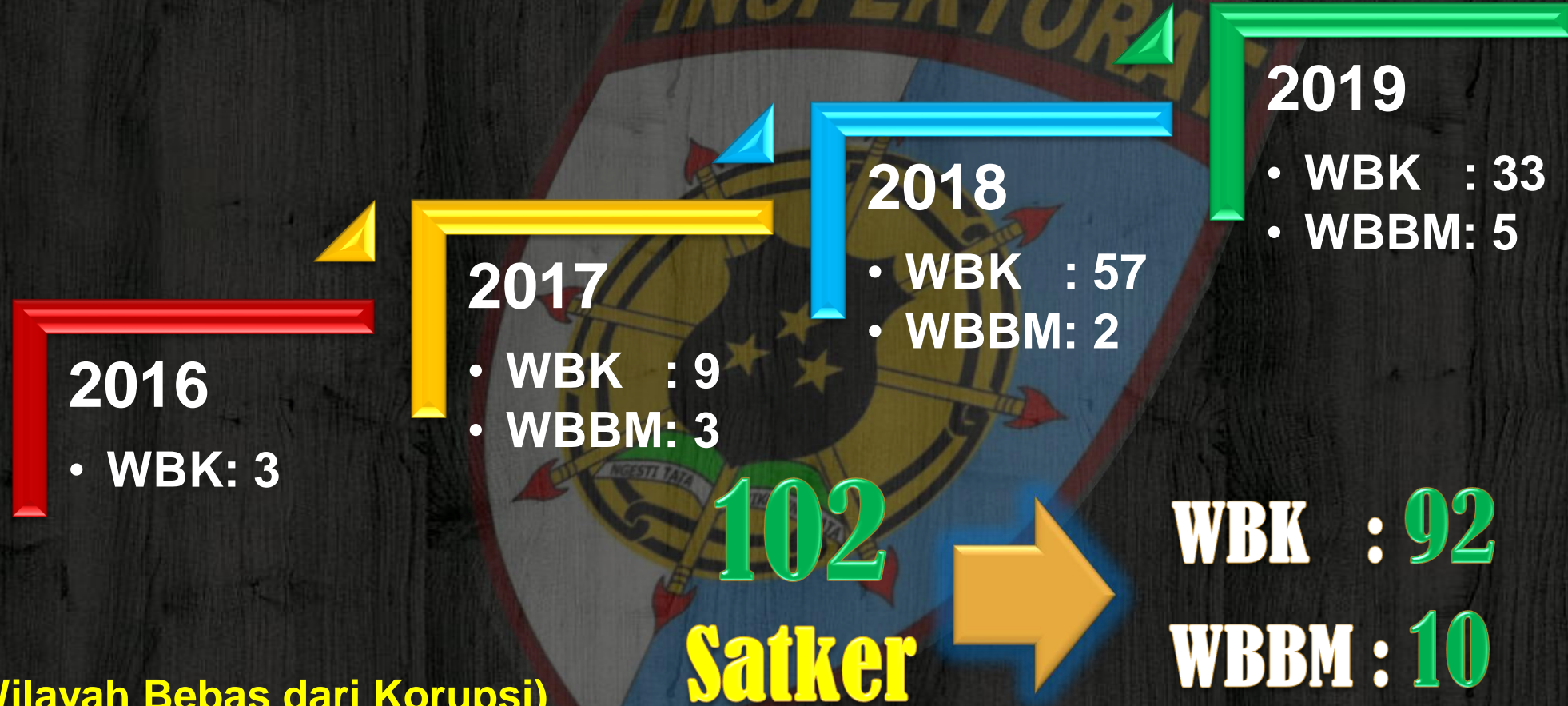


4. Zona Integritas





CAPAIAN POLRI



WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)
WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

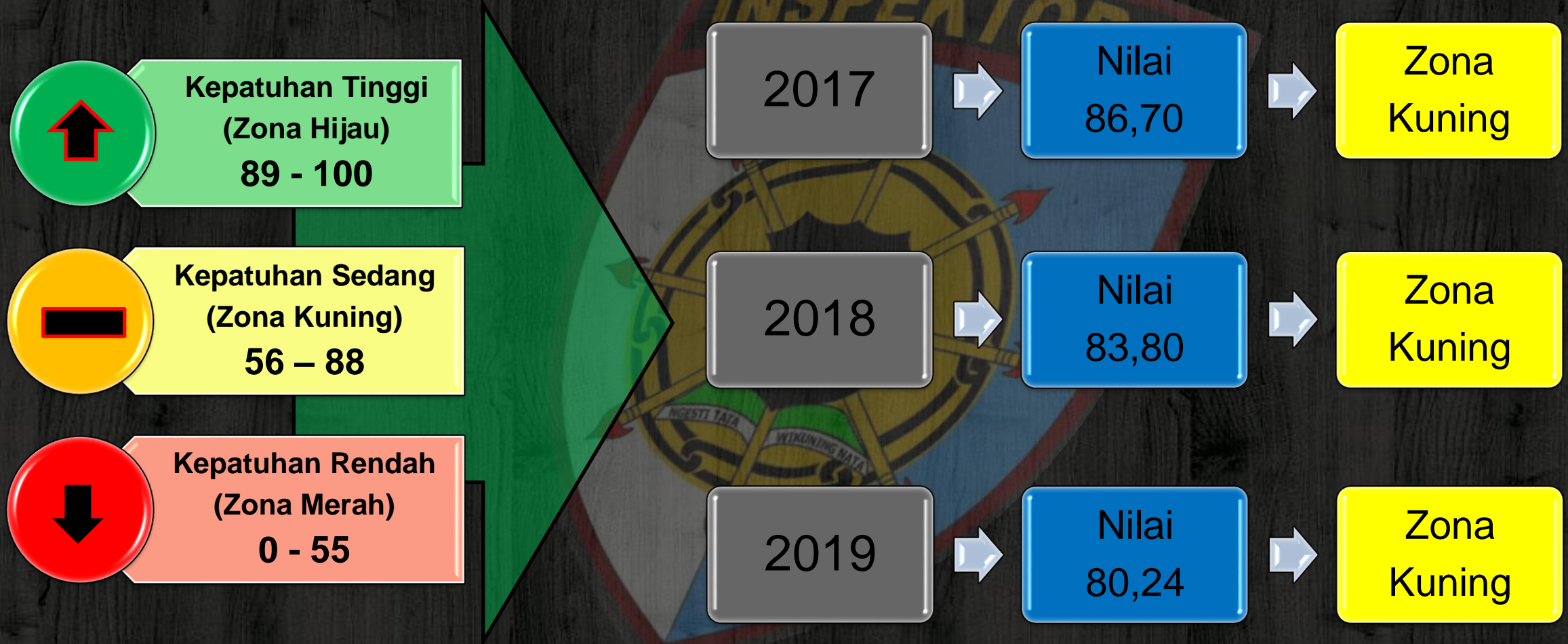


WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)





NILAI KEPATUHAN STANDAR YANLIK POLRI





5. Penutup





KESIMPULAN

1. Prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien dan ekonomis sebagaimana semangat *Clean Government* dan *Good Governance* dapat diwujudkan melalui kegiatan wasrik. Dengan terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini maka sudah barang tentu pelayanan yang diskriminatif dapat dihilangkan.
2. Tindak lanjut Dumas merupakan upaya menjernihkan penanganan perkara secara obyektif dan proporsional yang diikuti dengan pemberian informasi secara *edukatif* kepada pelapor atau pendumas. Kendala-kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut dan bagaimana kepastian hukumnya disampaikan secara transparan kepada pelapor.
3. Penilaian dan survei Ombudsman RI memberikan informasi perbaikan yang sangat dibutuhkan oleh Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Penilaian yang didasari dengan hasil survei dan pengumpulan data yang *valid* dapat langsung ditindaklanjuti secara konkret dan aktual. Penilaian dan pengawasan eksternal melengkapi pengawasan internal yang telah dilakukan oleh unsur pimpinan satuan kerja dan aparat Inspektorat Pengawasan Polri.



SEKIAN & TERIMA KASIH
